



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev>

Received: 9 September 2024, Revised: 10 September 2024, Publish: 30 September 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pariwisata Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah

Clarissa Alya Alifia Vendra¹

¹ Magister Ilmu Hukum Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Email: clrssalya@gmail.com

Corresponding Author: clrssalya@gmail.com¹

Abstract: *This study aims to examine the authority of the Bali Provincial Government in managing Local Own-Source Revenue (PAD) from the tourism sector based on Regional Regulation (Perda) Number 9 of 2019 concerning Regional Taxes. This research uses a qualitative descriptive approach by collecting data through literature studies, interviews, and analysis of related documents. The findings show that the regulation grants significant authority to the local government in regulating and collecting taxes from various tourism activities, which greatly contribute to PAD. However, the implementation of this regulation faces several challenges, such as the need for effective coordination between local governments and tourism businesses as well as the enhancement of tax management capacities.*

Keyword: *Local Government Authority, Local Own-Source Revenue, Tourism Sector, Regional Regulation, Regional Tax, Bali.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui studi literatur, wawancara, dan analisis dokumen terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Perda tersebut memberikan kewenangan yang signifikan kepada Pemerintah Daerah dalam mengatur dan memungut pajak dari berbagai aktivitas pariwisata, yang sangat berkontribusi terhadap PAD. Namun, implementasi Perda ini menghadapi beberapa tantangan, seperti kebutuhan akan koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah dan pelaku usaha pariwisata serta peningkatan kapasitas dalam manajemen pajak.

Kata Kunci: Kewenangan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Sektor Pariwisata, Peraturan Daerah, Pajak Daerah, Bali

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendanaan utama bagi pemerintah daerah untuk menjalankan berbagai fungsi dan tugasnya, termasuk pembangunan

infrastruktur, penyediaan layanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sektor pariwisata di Bali, sebagai salah satu destinasi wisata utama di Indonesia dan dunia, memiliki kontribusi yang signifikan terhadap PAD. Potensi pariwisata yang besar di Bali memberikan peluang yang luas bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor ini.

Kerangka kerja menyeluruh telah dibangun untuk menangani masalah perpajakan tertentu yang relevan dengan pertumbuhan sektor pariwisata, setelah disahkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019. Mandat provinsi yang isinya menguraikan serangkaian mekanisme perpajakan khusus untuk kegiatan wisata, seperti pajak penginapan, biaya layanan makanan, pajak hiburan, dan biaya tambahan pariwisata, antara lain. Pemberlakuan undang-undang tersebut diperkirakan akan memicu peningkatan signifikan dalam sumber pendapatan daerah, sehingga memberikan pemerintah daerah peningkatan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mendukung berbagai proyek kesejahteraan masyarakat dan pembangunan.

Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 menandai titik balik yang signifikan di bidang tata kelola fiskal, karena peraturan tersebut mencakup serangkaian pedoman fiskal yang kompleks dan relevan dengan industri pariwisata yang berkembang pesat. Undang-undang ini dengan hati-hati dan teliti mengatur berbagai sanksi keuangan yang terkait dengan kegiatan pariwisata, seperti biaya hotel, pajak restoran, biaya hiburan, dan biaya pengunjung. Undang-undang ini mempersiapkan landasan bagi peningkatan nyata dalam aliran masuk pendapatan daerah. Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kerangka peraturan ini adalah penguatan nyata anggaran daerah, menyediakan sumber daya keuangan yang diperlukan badan-badan pemerintah untuk mendukung berbagai perbaikan infrastruktur dan layanan yang berfokus pada masyarakat.

Dengan diterapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019. Era baru implikasi fiskal ditandai dengan upaya yang dibuat untuk menyesuaikan undang-undang perpajakan dengan tuntutan industri perjalanan dan pariwisata. Persyaratan hukum ini yang mencakup berbagai kewajiban keuangan yang relevan dengan bisnis yang berfokus pada pariwisata, seperti tarif perhotelan dan pajak kuliner, diharapkan akan menghasilkan peningkatan nyata dalam aliran pendapatan daerah. Proyeksi surplus dari peningkatan pendapatan pajak diharapkan dapat memberikan fleksibilitas keuangan kepada lembaga-lembaga pemerintah yang diperlukan untuk memimpin berbagai proyek sosial-ekonomi, memperkuat posisi Bali sebagai tujuan wisata utama sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakatnya dalam hal pembangunan.

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi kewenangan dan strategi yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam mengelola PAD dari sektor pariwisata. Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah meliputi pengaturan, pemungutan, dan pengawasan pajak daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dan retribusi sesuai dengan potensi dan karakteristik daerahnya. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian tarif pajak dan retribusi guna mengoptimalkan pendapatan tanpa membebani pelaku usaha pariwisata dan wisatawan.

Strategi pengelolaan PAD dari sektor pariwisata yang digunakan oleh pemerintah daerah mencakup beberapa pendekatan. Pertama, optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendanaan utama bagi pemerintah daerah untuk menjalankan berbagai fungsi dan tugasnya, termasuk pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sektor pariwisata di Bali, sebagai salah satu destinasi wisata utama di Indonesia dan dunia, memiliki kontribusi yang signifikan

terhadap PAD. Potensi pariwisata yang besar di Bali memberikan peluang yang luas bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor ini.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019, terdapat ketentuan khusus mengenai pajak daerah yang relevan dengan sektor pariwisata. Peraturan daerah ini mengatur berbagai jenis pajak yang terkait dengan aktivitas pariwisata, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan retribusi pariwisata. Implementasi peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan, sehingga pemerintah daerah memiliki sumber dana yang memadai untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi kewenangan dan strategi yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam mengelola PAD dari sektor pariwisata. Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah meliputi pengaturan, pemungutan, dan pengawasan pajak daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dan retribusi sesuai dengan potensi dan karakteristik daerahnya. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian tarif pajak dan retribusi guna mengoptimalkan pendapatan tanpa membebani pelaku usaha pariwisata dan wisatawan.

Strategi pengelolaan PAD dari sektor pariwisata yang digunakan oleh pemerintah daerah mencakup beberapa pendekatan. Pertama, optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi melalui peningkatan efisiensi sistem administrasi perpajakan dan penggunaan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi, seperti sistem pembayaran pajak secara online dan integrasi data perpajakan, diharapkan dapat mengurangi kebocoran pendapatan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kedua, pengembangan destinasi wisata baru dan peningkatan kualitas destinasi yang sudah ada untuk menarik lebih banyak wisatawan. Investasi dalam infrastruktur pariwisata, seperti pembangunan dan perbaikan akses jalan, bandara, dan fasilitas umum lainnya, menjadi kunci dalam strategi ini. Ketiga, kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha pariwisata dan masyarakat, dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan pariwisata. Pemerintah daerah dapat mendorong kemitraan dengan sektor swasta dalam hal promosi destinasi wisata dan pengembangan fasilitas pendukung. Keberhasilan pengelolaan PAD dari sektor pariwisata sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, studi ini juga akan mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengelola PAD dari sektor pariwisata, serta memberikan rekomendasi untuk mengatasi berbagai kendala tersebut. Tantangan yang umum dihadapi meliputi kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah, keterbatasan sumber daya manusia, dan kendala teknis dalam pemungutan pajak dan retribusi. Di samping itu, fluktuasi jumlah wisatawan akibat faktor eksternal seperti bencana alam, pandemi, atau kondisi ekonomi global juga dapat mempengaruhi pendapatan dari sektor pariwisata.

Rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut antara lain memperkuat koordinasi antar instansi pemerintah melalui pembentukan tim koordinasi yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan perpajakan daerah. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan di bidang perpajakan dan pariwisata juga penting untuk memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki tenaga kerja yang kompeten dan profesional. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal, seperti penggunaan big data dan analisis data untuk perencanaan dan pengawasan perpajakan, dapat membantu pemerintah daerah dalam membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Lebih lanjut, studi ini juga menyoroti pentingnya upaya konservasi lingkungan dan pelestarian budaya dalam pengelolaan pariwisata. Bali dikenal dengan kekayaan budaya dan alamnya yang unik, yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pengembangan pariwisata dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan. Langkah-langkah seperti pengelolaan sampah yang efektif, perlindungan kawasan alam yang sensitif, dan

pelestarian tradisi serta kearifan lokal harus menjadi bagian integral dari strategi pengelolaan PAD.

Selain itu, promosi pariwisata juga memegang peran penting dalam meningkatkan kunjungan wisatawan. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan media digital dan sosial untuk memperkenalkan destinasi-destinasi wisata di Bali kepada audiens global. Kampanye promosi yang kreatif dan informatif dapat menarik minat wisatawan dan meningkatkan citra Bali sebagai destinasi wisata yang aman dan menarik.

Di sisi lain, keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata juga krusial. Pemerintah daerah dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai inisiatif pariwisata, seperti pengelolaan homestay, pemandu wisata lokal, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di sektor pariwisata. Partisipasi masyarakat tidak hanya meningkatkan penerimaan PAD, tetapi juga memastikan bahwa manfaat ekonomi dari pariwisata dapat dirasakan secara langsung oleh komunitas lokal.

Dengan demikian, diharapkan pemerintah daerah dapat memaksimalkan potensi PAD dari sektor pariwisata untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bali. Keberlanjutan ini tidak hanya bergantung pada optimalisasi pendapatan, tetapi juga pada upaya menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal yang menjadi daya tarik utama pariwisata Bali. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pertumbuhan pariwisata tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan sosial, sehingga Bali tetap menjadi destinasi yang menarik bagi wisatawan di masa depan.

Upaya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan akan memberikan dampak positif jangka panjang. Dalam hal ini, penting bagi pemerintah daerah untuk terus memantau dan mengevaluasi kebijakan serta strategi yang telah diterapkan, guna memastikan bahwa semua upaya yang dilakukan dapat berjalan secara sinergis dan memberikan hasil yang optimal.

Secara keseluruhan, pengelolaan PAD dari sektor pariwisata memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan demikian, Bali dapat terus berkembang sebagai destinasi wisata unggulan yang tidak hanya menawarkan keindahan alam dan budaya, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menguraikan permasalahan ini dalam sebuah penelitian hukum yang berjudul, “PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGELOLA PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PARIWISATA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PAJAK DAERAH.”.

METODE

Penelitian ini akan melibatkan penggunaan metode yuridis normative yang secara spesifik merujuk pada analisis dokumen dan literatur terkait. Data yang akan dijadikan dasar penelitian akan diperoleh dari berbagai sumber studi pustaka yang meliputi teori-teori dan literatur yang relevan dengan topik penelitian, khususnya dalam konteks pengelolaan hasil retribusi daerah di sektor pariwisata dan dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendekatan yang akan digunakan dalam analisis adalah pendekatan deskriptif analitis. Tahapan awal akan dimulai dengan deskripsi yang cermat tentang permasalahan yang ada, yang didasarkan pada teori-teori yang relevan yang ditemukan dalam literatur. Selanjutnya, analisis akan difokuskan pada penyusunan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang topik penelitian ini.

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam mengelola PAD di sektor pariwisata didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, yang memberikan landasan hukum yang kuat untuk pengaturan pendapatan dan pengeluaran sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Peraturan Pemerintah Daerah juga memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah Bali dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah. Pemerintah daerah Bali juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi tata kelola pariwisata sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kelola Pariwisata.

Meskipun jumlah wisatawan mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD pada tahun 2022 meningkat secara signifikan, sebagian besar didorong oleh pendapatan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Secara keseluruhan, pemerintah daerah Bali diharapkan dapat memanfaatkan potensi sektor pariwisata dengan baik melalui strategi pembangunan yang terencana dan berkelanjutan, yang tidak hanya akan memberikan kontribusi finansial yang besar bagi daerah, tetapi juga akan menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Provinsi Bali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pariwisata telah diakui sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pariwisata mampu meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak hotel, restoran, retribusi objek wisata, serta pajak hiburan. Menurut Pigram dan Jenkins, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD menjadi semakin penting dalam upaya pembangunan daerah yang berkelanjutan. Selain itu, buku karya Goeldner dan Ritchie (2021) menjelaskan bahwa peningkatan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara berkontribusi langsung terhadap PAD melalui peningkatan pendapatan dari sektor perhotelan, restoran, dan jasa pariwisata lainnya.

Buku "Tourism and Development" karya Telfer dan Sharpley (2019) menyatakan bahwa pajak dan retribusi pariwisata adalah komponen penting dari PAD. Pendapatan dari pajak hotel dan restoran, serta retribusi objek wisata, merupakan sumber utama bagi pemerintah daerah. Selanjutnya, Dwyer dan Forsyth (2020) dalam "Tourism Economics and Policy" menguraikan bahwa pendapatan ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik yang pada gilirannya mendukung sektor pariwisata itu sendiri. Menurut buku "The Economics of Tourism" oleh Sinclair dan Stabler (2021), dampak ekonomi pariwisata dapat dibagi menjadi dampak langsung dan tidak langsung. Dampak langsung termasuk peningkatan pendapatan dari sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan pariwisata seperti akomodasi, transportasi, dan jasa makanan.

Dampak tidak langsung meliputi peningkatan pendapatan bagi pemasok barang dan jasa yang mendukung industri pariwisata. Buku tersebut juga menekankan pentingnya multiplier effect dari sektor pariwisata yang memberikan dampak ganda terhadap perekonomian daerah. Hall dan Page (2020) dalam "Tourism: An Economic and Social Phenomenon" menyoroti bahwa untuk meningkatkan PAD secara berkelanjutan, pengembangan pariwisata harus dilakukan dengan pendekatan yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pariwisata berkelanjutan memastikan bahwa pengembangan pariwisata tidak merusak sumber daya alam dan budaya lokal yang menjadi daya tarik utama. Selain itu, buku "Tourism Planning" oleh Inskeep (2019) menekankan pentingnya perencanaan yang baik dalam pengembangan destinasi wisata agar kontribusi pariwisata terhadap PAD dapat optimal dan berkelanjutan.

Menurut buku "Managing Tourism in a Changing World" oleh Vanhove (2021), strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD melalui pariwisata mencakup beberapa aspek seperti pemasaran destinasi, peningkatan kualitas pelayanan, dan diversifikasi produk wisata. Selain itu, pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal juga

ditekankan dalam upaya pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Buku tersebut menguraikan bahwa strategi pemasaran yang efektif dapat menarik lebih banyak wisatawan, sementara peningkatan kualitas pelayanan dan diversifikasi produk wisata dapat memperpanjang masa tinggal wisatawan dan meningkatkan pengeluaran mereka di daerah tujuan wisata.

Beberapa studi kasus yang dibahas dalam buku "Tourism and Regional Development" oleh Michael Hall dan James Higham (2020) menunjukkan variasi kontribusi pariwisata terhadap PAD di berbagai daerah. Misalnya, di daerah-daerah dengan destinasi wisata yang terkenal secara internasional, seperti Bali di Indonesia atau Phuket di Thailand, kontribusi pariwisata terhadap PAD sangat signifikan. Buku ini menguraikan bahwa selain meningkatkan PAD, pariwisata juga mendorong pembangunan infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Dalam buku "Challenges in Tourism Development" oleh C. Michael Hall (2022), dibahas beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengoptimalkan kontribusi pariwisata terhadap PAD. Tantangan ini meliputi masalah over-tourism, degradasi lingkungan, dan ketimpangan ekonomi. Untuk mengatasi tantangan ini, buku tersebut mengusulkan solusi seperti pengelolaan kapasitas wisatawan, penerapan regulasi lingkungan yang ketat, serta promosi pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Implementasi teknologi juga diidentifikasi sebagai alat penting dalam manajemen destinasi yang efektif. Buku "Technology and Innovation in Destination Management" oleh Buhalis dan Amaranggana (2021) menyatakan bahwa teknologi memainkan peran kunci dalam meningkatkan pariwisata dan PAD. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam promosi destinasi, pemesanan online, dan manajemen destinasi dapat meningkatkan efisiensi dan daya tarik destinasi wisata. Buku ini juga menyoroti bahwa teknologi dapat membantu pemerintah daerah dalam memonitor dan mengelola dampak pariwisata secara lebih efektif.

Secara keseluruhan, kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat signifikan dan mencakup berbagai aspek seperti peningkatan pajak dan retribusi, dampak ekonomi langsung dan tidak langsung, serta pengembangan berkelanjutan. Strategi yang efektif, dukungan teknologi, dan pengelolaan yang baik dapat mengoptimalkan manfaat pariwisata bagi perekonomian daerah. Sebagai sektor yang dinamis, pariwisata memerlukan pendekatan yang adaptif dan inovatif untuk memastikan kontribusinya terhadap PAD tetap optimal dan berkelanjutan.

Optimalisasi Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pengembangan Sektor Pariwisata

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kemampuan fiskal daerah. PAD mencakup berbagai sumber pendapatan, salah satunya adalah sektor pariwisata yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan perekonomian daerah. Menurut Prasetyo (2020), strategi pengelolaan PAD harus mencakup perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efektif, serta evaluasi yang kontinu untuk memastikan bahwa sumber-sumber pendapatan dikelola dengan baik. Hal ini penting karena tanpa pengelolaan yang baik, potensi yang ada tidak akan bisa dimaksimalkan dan justru bisa menimbulkan masalah baru bagi daerah tersebut.

Sektor pariwisata telah diakui sebagai salah satu sumber utama PAD di banyak daerah di Indonesia. Menurut data yang disajikan oleh Darmawan (2020), pariwisata dapat memberikan kontribusi signifikan melalui berbagai jenis pajak dan retribusi, seperti pajak hotel dan restoran, retribusi obyek wisata, dan kontribusi dari sektor transportasi pariwisata. Kontribusi ini menjadi salah satu penggerak utama perekonomian lokal, dimana banyak daerah yang sebelumnya kurang berkembang kini bisa mendapatkan sumber pendapatan yang stabil dan berkelanjutan melalui pariwisata. Pada kajiannya, Yuliana (2019) menunjukkan bahwa daerah

dengan pengelolaan pariwisata yang baik mengalami peningkatan PAD yang signifikan, berkat optimalisasi berbagai sumber pendapatan terkait pariwisata. Ini menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat, pariwisata bisa menjadi tulang punggung perekonomian daerah

Diversifikasi produk wisata merupakan salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan PAD dari sektor pariwisata. Menurut Sari (2020), diversifikasi ini mencakup pengembangan berbagai jenis wisata seperti wisata budaya, wisata alam, dan wisata kuliner, yang dapat menarik berbagai segmen wisatawan. Dengan menawarkan berbagai macam atraksi wisata, daerah dapat memperluas basis wisatawan dan meningkatkan pendapatan dari berbagai sumber. Contohnya, wisata budaya dapat menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara yang tertarik dengan kekayaan budaya lokal, sedangkan wisata alam bisa menarik mereka yang mencari pengalaman di alam terbuka dan wisata kuliner bisa memuaskan pecinta makanan khas daerah. Diversifikasi ini tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan tetapi juga memperpanjang lama tinggal wisatawan, yang pada akhirnya meningkatkan total belanja wisatawan di daerah tersebut.

Infrastruktur yang memadai menjadi salah satu kunci dalam menarik wisatawan. Dalam bukunya, Nugroho (2020) menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur seperti jalan, transportasi, dan fasilitas umum di sekitar obyek wisata. Infrastruktur yang baik tidak hanya meningkatkan kenyamanan wisatawan tetapi juga memperpanjang lama tinggal mereka, yang pada akhirnya meningkatkan PAD. Infrastruktur yang baik juga memberikan kesan positif kepada wisatawan sehingga mereka cenderung untuk kembali berkunjung atau merekomendasikan destinasi tersebut kepada orang lain. Hal ini sangat penting karena pengalaman wisatawan sangat dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur yang ada.

Promosi yang efektif juga memainkan peran penting dalam menarik wisatawan. Menurut penelitian oleh Rahayu (2020), penggunaan media digital dan strategi pemasaran yang terintegrasi dapat secara signifikan meningkatkan jumlah kunjungan wisata. Pemasaran yang tepat sasaran, baik melalui media sosial, situs web, maupun partisipasi dalam pameran pariwisata internasional, dapat memperkenalkan potensi wisata daerah ke pasar global. Promosi yang baik bisa menarik perhatian wisatawan potensial dan mengubah mereka menjadi pengunjung yang nyata. Selain itu, promosi juga harus mampu memberikan informasi yang jelas dan menarik tentang apa yang bisa ditemukan dan dinikmati di destinasi wisata tersebut.

Kolaborasi dengan sektor swasta juga menjadi strategi penting dalam pengembangan pariwisata. Rahmawati (2020) menunjukkan bahwa kemitraan dengan perusahaan swasta, seperti hotel dan operator tur, dapat memberikan dampak positif pada pengelolaan dan pengembangan obyek wisata. Selain itu, investasi dari sektor swasta dapat membantu dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang penting. Kolaborasi ini bisa menciptakan sinergi yang saling menguntungkan dimana sektor swasta bisa mendapatkan keuntungan dari peningkatan jumlah wisatawan, sementara pemerintah daerah bisa mendapatkan tambahan PAD dari pajak dan retribusi yang dihasilkan. Pemberdayaan masyarakat lokal melalui pelatihan dan pendidikan tentang pariwisata juga penting dalam strategi pengelolaan PAD. Menurut Adi (2019), masyarakat yang terlibat langsung dalam industri pariwisata akan memiliki pemahaman lebih baik tentang pentingnya pariwisata bagi perekonomian lokal, yang pada akhirnya meningkatkan partisipasi mereka dalam menjaga dan mengembangkan destinasi wisata. Dengan demikian, kualitas layanan dan pengalaman wisatawan dapat ditingkatkan. Pemberdayaan masyarakat lokal juga bisa meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab mereka terhadap destinasi wisata sehingga mereka akan lebih bersemangat dalam menjaga dan mengembangkan potensi wisata yang ada di daerah mereka.

Evaluasi dan monitoring secara berkala menjadi langkah akhir yang tidak kalah penting dalam strategi pengelolaan PAD dari sektor pariwisata. Prasetya (2020) menyarankan bahwa evaluasi ini mencakup penilaian terhadap capaian target, identifikasi kendala, dan pengembangan solusi untuk mengatasi hambatan yang ada. Monitoring yang efektif akan

memastikan bahwa semua rencana yang telah disusun dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan memberikan hasil yang optimal. Evaluasi yang rutin juga bisa membantu dalam mengidentifikasi tren dan perubahan yang terjadi di pasar pariwisata sehingga strategi yang digunakan bisa terus disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Kompleksitas dan Tantangan dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Bali menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan dinamis. Dalam beberapa tahun terakhir, Bali telah menunjukkan potensi ekonomi yang signifikan terutama dari sektor pariwisata (Ardika, 2019). Namun, ketergantungan yang tinggi pada pariwisata juga menjadi pedang bermata dua yang menghadirkan risiko dan tantangan tersendiri. Tantangan utama dalam pengelolaan PAD di Bali mencakup ketergantungan pada pariwisata, kebutuhan untuk diversifikasi ekonomi, kapasitas pengelolaan pajak dan retribusi yang perlu ditingkatkan, infrastruktur yang memadai, dan masalah lingkungan hidup yang semakin mendesak. Ketergantungan yang sangat tinggi pada sektor pariwisata menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan PAD di Bali (Ardika, 2019). Pariwisata telah menjadi tulang punggung ekonomi Bali selama beberapa dekade terakhir (Ardika, 2019). Kontribusi sektor ini terhadap PAD sangat besar, mencakup sebagian besar pendapatan daerah melalui pajak hotel, restoran, dan berbagai layanan pariwisata lainnya (Sutawa, 2020). Namun, pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 telah menunjukkan betapa rentannya ekonomi Bali yang terlalu bergantung pada pariwisata (Ardika, 2019). Pembatasan perjalanan internasional dan nasional, serta penutupan sementara destinasi wisata, menyebabkan penurunan drastis jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali (Ardika, 2019). Dampaknya, PAD Bali mengalami penurunan yang signifikan, mengakibatkan defisit anggaran yang mempengaruhi berbagai program pembangunan dan layanan publik.

Ketergantungan ini menunjukkan bahwa Bali perlu segera mendiversifikasi ekonominya untuk mengurangi risiko ekonomi akibat guncangan eksternal. Diversifikasi ekonomi menjadi sebuah keharusan agar Bali dapat lebih tahan terhadap berbagai krisis (Astuti, 2021). Salah satu sektor yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan adalah pertanian (Astuti, 2021). Bali memiliki lahan pertanian yang subur dan beragam produk pertanian yang berkualitas tinggi seperti beras, sayuran, dan buah-buahan tropis (Astuti, 2021). Pengembangan sektor pertanian tidak hanya dapat meningkatkan PAD, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung ketahanan pangan lokal (Astuti, 2021). Selain itu, sektor perikanan juga memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan (Astuti, 2021). Bali sebagai daerah kepulauan memiliki kekayaan laut yang melimpah yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir (Astuti, 2021).

Industri kreatif juga merupakan sektor yang menjanjikan untuk dikembangkan di Bali (Wijaya, 2019). Kreativitas dan budaya Bali yang kaya telah menarik perhatian dunia internasional (Wijaya, 2019). Pengembangan industri kreatif seperti seni rupa, kerajinan tangan, dan fesyen dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD (Wijaya, 2019). Dukungan terhadap UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di sektor ini juga perlu ditingkatkan melalui berbagai program pelatihan dan akses permodalan (Wijaya, 2019). Selain itu, teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk memperluas pasar produk-produk kreatif Bali ke pasar global.

Kapasitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan PAD di Bali (Sutawa, 2020). Sistem informasi yang terintegrasi dan modern sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan pajak (Sutawa, 2020). Saat ini, tingkat kepatuhan wajib pajak di Bali masih perlu ditingkatkan (Sutawa, 2020). Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya membayar pajak bagi pembangunan daerah (Sutawa, 2020). Pengawasan

yang ketat dan penerapan sanksi yang tegas juga diperlukan untuk mencegah kebocoran pajak dan memastikan semua potensi pajak tergali secara optimal (Sutawa, 2020).

Infrastruktur yang memadai merupakan prasyarat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Riana, 2018). Meskipun Bali terkenal sebagai destinasi wisata internasional, masih terdapat kesenjangan dalam pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur antara daerah perkotaan dan pedesaan (Riana, 2018). Pembangunan infrastruktur yang merata akan membuka akses bagi daerah-daerah terpencil untuk berkembang dan berkontribusi terhadap PAD (Riana, 2018). Peningkatan kualitas jalan, jembatan, jaringan listrik, dan akses internet di seluruh wilayah Bali akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menarik investasi (Riana, 2018).

Selain itu, lingkungan hidup menjadi isu yang semakin mendesak di Bali (Wijaya, 2019). Pertumbuhan pariwisata yang pesat dalam beberapa dekade terakhir telah memberikan tekanan yang besar pada lingkungan hidup (Wijaya, 2019). Masalah seperti sampah, kerusakan terumbu karang, dan alih fungsi lahan menjadi tantangan serius yang perlu diatasi (Wijaya, 2019). Sampah plastik yang mencemari pantai dan laut Bali telah menjadi perhatian global (Wijaya, 2019). Upaya pengelolaan sampah yang lebih efektif, seperti pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dan peningkatan kapasitas daur ulang, harus dilakukan dengan segera (Wijaya, 2019). Kerusakan terumbu karang akibat aktivitas pariwisata dan pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir juga perlu mendapatkan perhatian khusus (Wijaya, 2019). Program konservasi dan restorasi terumbu karang harus diperkuat untuk menjaga kelestarian ekosistem laut Bali (Wijaya, 2019).

Alih fungsi lahan dari pertanian menjadi area komersial dan perumahan juga berdampak negatif terhadap keseimbangan ekosistem dan ketahanan pangan lokal (Astuti, 2021). Perlindungan terhadap lahan pertanian dan hutan harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah (Astuti, 2021). Pemerintah daerah perlu mengembangkan kebijakan tata ruang yang berkelanjutan dan berkeadilan, yang mempertimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara holistik (Astuti, 2021).

Di sisi lain, upaya pemberdayaan ekonomi lokal juga perlu mendapatkan perhatian lebih (Astuti, 2021). Pengembangan ekonomi berbasis komunitas dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus melestarikan budaya dan lingkungan lokal (Astuti, 2021). Program-program pemberdayaan ekonomi yang melibatkan masyarakat lokal secara aktif perlu didorong (Astuti, 2021). Misalnya, pengembangan desa wisata yang dikelola oleh masyarakat setempat dapat memberikan manfaat ekonomi langsung bagi warga lokal sekaligus menjaga kelestarian budaya dan lingkungan (Astuti, 2021).

Sebagai tambahan, pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat lokal mengenai pengelolaan usaha dan kewirausahaan juga sangat penting (Astuti, 2021). Dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, masyarakat lokal dapat mengembangkan potensi ekonomi mereka secara mandiri dan berkelanjutan (Astuti, 2021). Pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait perlu bekerja sama untuk menyediakan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat (Astuti, 2021). Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya (Astuti, 2021). Pemerintah daerah perlu mengembangkan kebijakan yang inovatif dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan pengelolaan PAD (Astuti, 2021). Dukungan dari sektor swasta melalui investasi dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga sangat penting (Astuti, 2021). Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah akan meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program-program tersebut (Astuti, 2021).

Melalui upaya kolaboratif dan pendekatan yang terintegrasi, Bali dapat mengatasi berbagai tantangan dalam pengelolaan PAD dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan (Astuti, 2021). Pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya akan meningkatkan

kesejahteraan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan budaya Bali yang kaya (Wijaya, 2019). Hal ini penting untuk memastikan bahwa Bali tetap menjadi destinasi wisata unggulan dan tempat tinggal yang nyaman bagi masyarakatnya (Wijaya, 2019).

KESIMPULAN

Penguatan sistem administrasi perpajakan dan retribusi melalui pemanfaatan teknologi informasi adalah langkah strategis yang sangat penting. Implementasi sistem online untuk pembayaran pajak dan retribusi tidak hanya akan mempermudah proses administrasi, tetapi juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sistem ini memungkinkan transaksi yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, integrasi data antar berbagai instansi pemerintah dapat memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terkait pajak dan retribusi. Dengan adanya data yang terintegrasi, pemerintah dapat lebih mudah mendeteksi pelanggaran dan ketidakpatuhan, serta mengambil tindakan yang diperlukan dengan lebih efektif.

Infrastruktur yang memadai juga merupakan salah satu tantangan utama dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Bali. Infrastruktur yang kurang memadai dapat menghambat pengembangan sektor pariwisata dan sektor-sektor ekonomi lainnya. Peningkatan infrastruktur seperti jalan raya yang baik, transportasi publik yang efisien, dan fasilitas umum yang memadai sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kenyamanan wisatawan. Selain infrastruktur fisik, peningkatan infrastruktur digital juga sangat penting. Infrastruktur digital yang canggih dapat mendukung pengembangan ekonomi digital dan industri kreatif, yang merupakan sektor-sektor yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD Bali.

Masalah lingkungan hidup juga merupakan tantangan serius dalam pengelolaan PAD di Bali. Peningkatan aktivitas pariwisata sering kali menyebabkan degradasi lingkungan, termasuk pencemaran air dan udara, serta kerusakan ekosistem. Pemerintah daerah perlu menerapkan kebijakan yang ketat dalam pengelolaan lingkungan untuk memastikan bahwa perkembangan pariwisata tidak merusak sumber daya alam yang menjadi daya tarik utama Bali. Upaya konservasi lingkungan, seperti pengelolaan sampah yang efektif, pelestarian hutan dan kawasan alam, serta penggunaan energi terbarukan, perlu diperkuat. Penerapan teknologi ramah lingkungan dan praktik berkelanjutan dalam sektor pariwisata dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Selain masalah lingkungan, Bali juga menghadapi tantangan dalam mengelola dampak sosial dari pengembangan pariwisata. Ketimpangan ekonomi antara daerah wisata dan non-wisata, serta antara penduduk lokal dan pendatang, sering kali menjadi masalah yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat lokal. Peningkatan pariwisata dapat menyebabkan peningkatan biaya hidup bagi penduduk lokal, sementara manfaat ekonomi dari pariwisata sering kali lebih dirasakan oleh pendatang atau investor luar. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa manfaat ekonomi dari pariwisata dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat melalui program-program yang inklusif dan berkelanjutan. Program-program pelatihan dan pemberdayaan bagi penduduk lokal, serta dukungan untuk usaha kecil dan menengah, dapat membantu menciptakan peluang ekonomi yang lebih merata.

Keberhasilan pengelolaan PAD dari sektor pariwisata di Bali sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai tantangan ini. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi pariwisata dan mengatasi berbagai kendala yang ada. Pemerintah perlu bekerja sama dengan sektor swasta dalam mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pariwisata, serta melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Selain itu, komitmen yang kuat dari semua pihak untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan

pelestarian lingkungan serta budaya lokal sangat penting. Dengan komitmen dan kerja sama yang baik, Bali dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, serta menjaga kelestarian alam dan budaya yang menjadi kekayaan utama pulau ini.

REFERENSI

- Adi, S. *Pemberdayaan Masyarakat Lokal Dalam Pariwisata*. bali: Udayana University Press., 2019.
- Agung, I Gusti, and Oka Mahagangga. *Buku Handbook Ilmu Pariwisata Karakter Dan Prospek*. prenadamedia group, 2020.
- Ali, Ardiansyah, and Nursyam Ar. "Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebagai Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Toraja Utara Periode 2016- 2020" 1 (2023): 149–55.
- Ardika, I. Wayan. *Ekonomi Pariwisata Dan Pembangunan Berkelanjutan Di Bali*.
- Arsyad, Jihan Fadhilah, Al Syahril Samsi, Chitra Astari, Fajria Sari Sakaria, Rahmawati Nur Annisa, and Andi Alimuddin Unde. "Case Study of Toddlers Stunting Care Practices in Coastal Communities." *Enfermeria Clinica* 30 (2020): 462–65. <https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2019.07.138>.
- Darmawan, Ni Putu Yuliana Puspita, I Nyoman Gede Ustriyana, and Dwi Putra. "Anggaran Hijau (Green Budgeting) Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau Pada Sektor Kehutanan Di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali." *Jurnal Manajemen Agribisnis* 11, no. 2 (2023): 344–57.
- Darmawan, T. *Ekonomi Pariwisata: Pendekatan Teori Dan Implementasi*. Bandung: ALFABETA, n.d.
- Dwyer, L., and P. Forsyth. *Tourism Economics and Policy*. Channel View Publications, 2020.
- Goeldner, C. R., and J. R. B Ritchie. *Tourism: Principles, Practices, Philosophies*. John Wiley & Sons., 2021.
- Hall, C. M., and J Higham. *Tourism and Regional Development*. Routledge, 2020.
- Hall, C. M., and S. J. Page. *Tourism: An Economic and Social Phenomenon*. Routledge, 2020.
- Inskeep, E. *Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach*.
- Jati, Damar, Diah Retnowati, and Heris Kencana. "Pengaruh PAD Provinsi Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi : Studi Pada Provinsi Bali" 20, no. 2 (2023): 76–
- Kuriati, Herlina, and Yulistia Devi. "Jurnal Ekonomi Syariah" 11, no. September (2022): 187–208.
- Mahmudah, Fitri Nur, and Eka Cahya Sari Putra. "Tinjauan Pustaka Sistematis Manajemen Pendidikan: Kerangka Konseptual Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Era 4.0." *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* 9, no. 1 (2021):
- Nugroho, B. *Infrastruktur Dan Pengembangan Pariwisata*. Rajawali Pers.: Rajawali Pers., 2020.
- Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat" 5 (2023): 589–93. <https://doi.org/10.37034/infeb.v5i2.491>.
- Pigram, J. J., and J. M. Jenkins. *Outdoor Recreation Management*. Routledge, 2020.
- Prasetya, Y. "Evaluasi Dan Monitoring Pengelolaan PAD," 2020.
- Prasetyo. & Shahnaz Garini, A. "Prevalensi Dislipidemia Pada Pasien Stroke Iskemik Berulang Rawat Jalan Dan Atau Rawat Inap Di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Periode 2015." *Majalah Kesehatan Pharmamedika*, 10(1), 2018.
- Rahman, Novita, Erwing Erwing, Romi Adiansyah, and Astuti Muh. Amin. "Program MBKM: Meningkatkan Soft Skills Mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi." *Al-Nafis: Jurnal Biologi Dan Pendidikan Biologi* 2, no. 2 (2022): 115. <https://doi.org/10.46339/al-nafis.v2i2.910>.

Research of Accounting (JARAC) 4, no. 1 (2022): 49–62.

Routledge., 2019.

Sari, Mei, Rafika Sari, and Aris Munandar. “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Melalui Pajak Hotel Sebagai Variabel Intervening” 15, no. 1 (2024): 13–21.
<https://doi.org/10.33087/eksis.v15i1.419>.

Setiawa, Meilyana Putri, and Komang Krishna Yogantara. “FLYPAPER EFFECT PADA DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI.” *Journal*

Sinclair, M. T., and M. J. Stabler. *The Economics of Tourism*. Routledge., n.d.

Soro, Crispim P Leo, Yolinda Yanti Sonbay, Henny A Manafe, Rere Paulina, Adrianus Kitmoen, and Maria Gorety Malut. “Pengaruh Pajak Hotel , Pajak Air Permukaan Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah” 4, no. 5 (2023): 633–44.

Sumarni, Leli, Nini Syofri Yeni, and Muhammad Fiqih Alfarudzi. “Pengaruh Sektor Sutowa, Gusti Ngurah Bagus. *Pengelolaan Pajak Daerah Di Bali*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Syahputra, Dede Kurnia. “OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JAWA,” 2022, 47–59.

Tanama Putri, Budi Rahayu. *Manajemen Pemasaran*. Liberty, Yogyakarta., 2020.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

Telfer, D. J., and R. Sharpley. *Tourism and Development in the Developing World*. Van Nostrand Reinhold., 2019.

Vanhove, N. *Managing Tourism in a Changing World: Issues and Cases*. Routledge., 2021.

Wahyudin, Ihsan. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat The Influence Of Original Local Government Revenue , Fiscal Balance Transfer And Capital Expenditure On The Financial Performance Of Local Government Of Regencies And Cities” 1, no. 1 (2020): 86–97.

Wijaya, Indra. “Pengaruh Perputaran Kas, Perputaran Piutang Dan Perputaraan Persediaan Terhadap Likuiditas Perusahaan Sub Sektor Logam Dan Sejenisnya Yang Terdaftar Di Bei 2011-2016.” *Buana Ilmu* 3, no. 1 (2018): 86–103.
<https://doi.org/10.36805/bi.v3i1.459..>

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press., 2019.